


Sambutan dari Prof. Dr. Nur Syam, MSI
Guru Besar Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya

 AGREE MEDIA
PUBLISHING

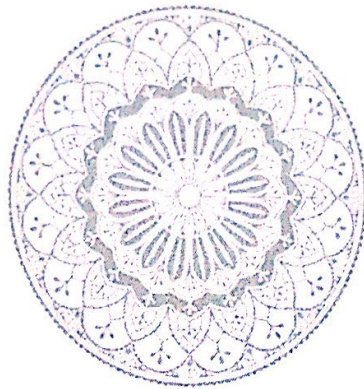
Pengembangan Masyarakat di Pesantren

Antara Dominasi Elit dan Budaya Lokal

BAMBANG BUDIWIRANTO

U.A.1.6 = 40 ①

**Pengembangan Masyarakat
di Pesantren
Antara Dominasi Elit dan Budaya Lokal**



Bambang Budiwiranto

 **AGREE MEDIA
PUBLISHING**

Pengembangan Masyarakat di Pesantren Antara Dominasi Elit dan Budaya Lokal

Penulis : Bambang Budiwiranto
ISBN : 978-623-93858-3-5 ✓
Editor : Alfiah, M.Ag.
Dr. Oriza Agustin, M.Si.

Layout : Fajar Prasetya, S.Pd.
Cover : Elin Wiji Astuti

Redaksi :

CV. Agree Media Publishing

Jl. Kepiting RT 012/RW 005
Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur,
Kota Metro, Lampung

Kantor Perwakilan :

- Mondoliko 431A, Umbulharjo, Yogyakarta
- Taman Lotus IV No.30, Bekasi, Jawa Barat
- Jl. Rajin, No.239 Tanah Garam, Kota Solok, Sumatera Barat
- Jl. Dwikora II, Padangsidempuan, Sumatera Utara

Email : agreemediapublishing@gmail.com
Website : www.agreemediapublishing.com
Contact : 0853-7783-0173
No. IKAPI : No. 010/LPU/2021 ✓

xiv + 155 hal ; 15 x 23 cm
Cetakan Pertama, Maret 2021

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
Atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Bismillah Alhamdulillah wash-shalatu wassalamu ..ala Rasulillah wa ..ala alihi wa shahbihi wa man wallah. Segala Puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah dan kekuatan dalam penulisan buku ini. Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw beserta keluarga beliau

Buku ini merupakan rekonstruksi dari thesis S2 yang penulis selesaikan sebagai salah satu persyaratan mendapatkan Master of Arts (Asian Studies) pada Faculty of Asian Studies, the Australian National University, Canberra pada tahun 2007. Banyak pihak yang berkontribusi terhadap penyelesaian buku ini. Ucapan terima kasih tertuju kepada Dr. Patrick Guinness dari Departemen Antropologi, the Australian National University yang secara tekun mendorong saya membangun argumentasi sebuah thesis secara kritis dan koheren.

Selanjutnya, saya berhutang budi kepada pihak yang banyak membantu selama pengumpulan data baik di Madura, Pati, dan Jakarta. KH Abdul Basith dan KH Syafi'i Anshory dari Pesantren Annuqayah sebagai pelaku sejarah, sangat generous dalam memberikan informasi yang berharga bagaimana proyek pengembangan masyarakat di Pesantren Annuqayah dirancang dan diimplementasikan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Prof. Dr. Nursyam, M. Si. yang telah bersedia memberikan kata sambutan untuk buku ini. Penghargaan saya tujukan kepada tim Agree Media Publishing, yang telah memungkinkan buku ini terpublikasi.

Saya persembahkan buku ini kepada istri dan anak saya, Alfiah Subari, dan Adib Mumtaz Irfani yang telah memberikan dukungan dan cinta yang besar sehingga membuat perjalanan studi saya di Australia sangat berharga. Semoga buku ini memberikan setitik kontribusi dalam bidang pengembangan masyarakat.

Bandar Lampung, Maret 2021
Penulis,

Bambang Budiwiranto

PENGEMBANGAN PESANTREN DAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN

Sambutan dari Prof. Dr. Nur Syam, MSI
Guru Besar Sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya

Pengantar

Pada tahun 1980-an, gema pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh sejumlah aktivis program pemberdayaan masyarakat memiliki sejumlah pengaruh. Program ini tidak hanya menasar kepada masyarakat tetapi juga pesantren. Program pemberdayaan masyarakat sesungguhnya diinisiasi oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bekerja sama dengan *Non Governmental Organization* (NGO) internasional yang memiliki kepedulian terhadap nasib masyarakat miskin di Indonesia, termasuk yang menjadi sasaran adalah lembaga-lembaga yang memiliki pengaruh besar bagi masyarakat.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang banyak pengaruhnya bagi masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan pada waktu itu. Di seluruh Indonesia, pesantren banyak yang mengkhususkan pada pembelajaran ilmu agama, namun demikian juga akhirnya harus memasuki dan menjadi lembaga pendidikan umum sesuai dengan tuntutan perubahan zaman. Jika di masa lalu pesantren itu identik dengan metode pembelajaran yang bercorak *wetonan*, *sorogan* dan *bandongan*, maka pada tahap berikutnya sudah mengadaptasi sistem pembelajaran berbasis sistem klasikal dan co-edukasi.

Pesantren sudah mengalami perubahan yang sangat fundamental, meskipun tetap ada hal yang tidak mengalami perubahan mendasar, yaitu pengajian kitab kuning atau kitab-kitab yang masyhur dalam pembelajaran di pesantren. Kemudian kebiasaan menjalankan ibadah-ibadah secara berjamaah dan ritual-ritual lain yang relevan dengan program pendidikan pesantren. Tetapi seiring dengan perubahan zaman, maka pesantren juga mengadaptasi pendidikan modern, yang ditandai dengan pendidikan klasikal dan sistem pembelajaran umum. Dari konsep pendidikan pesantren, maka terdapat gerakan dari "pesantren, madrasah dan sekolah".

Sistem pesantren dengan pembelajaran *sorogan*, *wetonan* dan *bandongan*, kemudian menjadi madrasah dengan sistem pendidikan

madrasi, dan lalu menjadi sekolah dengan sistem pendidikan klasikal dan co edukasi. Pada waktu menjadi pesantren, maka yang diajarkan murni kitab-kitab kuning, lalu ketika menjadi madrasah maka yang diajarkan adalah Pendidikan Agama Islam dan juga pendidikan umum, dan saat menjadi pendidikan sekolah maka menggunakan sistem pendidikan umum, meskipun pendidikan agama juga tetap diajarkan. Ketika menjadi pesantren, maka pesantren mengembangkan sendiri kurikulumnya, ketika menjadi madrasah maka menggunakan kurikulum Kementerian Agama, dan Ketika menjadi sekolah maka kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Jika pesantren berubah bukan berarti pesantren telah kehilangan kiblat sebagai institusi pendidikan agama, sebab apa pun sistem pendidikan yang digunakan akan tetap mengajarkan agama sebagai inti pembelajaran. Jika di siang hari para santri belajar ilmu sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikannya, maka di malam hari para santri akan belajar sesuai dengan sistem pesantren, yaitu belajar kitab kuning dan menjalankan ritual-ritual malam seperti shalat tahajud dan sebagainya. Inilah ciri khas dunia pesantren yang tidak akan lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan. Saya kira semua lembaga pendidikan pesantren akan tetap menjaga marwah kepesantrenannya dengan sistem ini.

Dunia pesantren sungguh sudah berubah secara signifikan dewasa ini. Pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan tetapi juga lembaga ekonomi dan lembaga sosial. Pesantren memang mengajarkan agama sebagai *core* bisnisnya, tetap telah merambah lebih jauh, misalnya mengembangkan koperasi, mini market, lembaga keuangan, dan bahkan usaha-usaha syariah lainnya. Selain itu juga mengembangkan lembaga kesehatan, lembaga bantuan hukum dan program-program pemberdayaan masyarakat. Pesantren sekarang sudah menjadi lembaga pendidikan multi fungsi seiring dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah dan berkembang.

Pengembangan Masyarakat

Di antara kritik yang dilakukan oleh NGO terhadap pola pembangunan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia adalah pembangunan tersebut minus partisipasi masyarakat. Ketiadaan partisipasi masyarakat tentu bukanlah hal yang baik, sebab masyarakat pada akhirnya akan merasa bahwa hasil pembangunan tersebut bukanlah miliknya atau apa yang sesungguhnya dibutuhkannya. Masyarakat menganggap bahwa pembangunan itu bahkan bukan diperuntukkan baginya. Jika seperti ini sikap masyarakat, maka dipastikan bahwa hasil pembangunan tersebut akan sia-sia dan tidak dimanfaatkan secara maksimal bahkan tidak pernah dipeliharanya.

Kritik para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah pembangunan tanpa arah atau pembangunan tanpa pelibatan masyarakat. Di dalam konsepsi para ahli pembangunan di era Orde baru, bahwa para ahli adalah yang memiliki sejumlah pengetahuan tentang pembangunan, sehingga para ahli adalah yang memiliki otoritas untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Masyarakat hanya sebagai penikmat saja. Apa dan bagaimana hasil pembangunan itu harus dinikmati saja. Tentu kemauan para ahli pembangunan ini juga memiliki landasan konseptual dan teoretis. Bagi para ahli ini, masyarakat dianggap sebagai obyek pembangunan dan bukan subyek pembangunan. Akibatnya masyarakat hanya menjadi penerima hasil pembangunan dan bukan perancang pembangunan untuk dirinya.

Pada waktu itu, perencanaan pembangunan dikonsepsikan sebagai *top down planning*, yaitu perencanaan pembangunan yang dirumuskan, dirancang dan dilakukan oleh para ahli karena para ahli pembangunan itulah yang mengetahui apa yang sebaiknya dan sebenarnya harus dilakukan untuk masyarakat. Pembangunan memang untuk masyarakat akan tetapi karena masyarakat itu bukan orang-orang yang *well educated*, maka harus diarahkan, dan dibimbing dan dibuatkan perencanaan berbasis keahlian para ahli pembangunan dimaksud. Akibatnya, masyarakat hanya menerima hasil pembangunan yang harus diterimanya tanpa harus terlibat di dalam prosesnya. Di dalam konteks ini, maka yang terjadi adalah adanya kesenjangan antara apa yang dibutuhkan dan yang dibangun untuk masyarakat. Akibat lebih jauh masyarakat merasa tidak memiliki hasil pembangunan tersebut, sebab tidak sama apa yang diperlukan dan apa yang dibangun. Akhirnya masyarakat apatis terhadap pembangunan.

Kesalahan pemikiran seperti ini dicoba untuk dikoreksi terutama oleh lembaga swadaya masyarakat yang beranggapan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci pembangunan yang sebenarnya. Kata pembangunan kemudian diubah menjadi pemberdayaan untuk menegaskan bahwa masyarakat memang tidak tahu cara untuk membuat perencanaan tetapi sesungguhnya mereka tahu apa yang diperlukan di dalam kehidupannya. Maka dirumuskanlah konsep baru yang disebut sebagai *bottom up planning* atau perencanaan berbasis arus bawah atau perencanaan berbasis masyarakat. Hal ini disadari bahwa masyarakatlah yang tahu kebutuhannya dan masyarakatlah yang harus menentukan apa yang akan dilakukannya untuk dirinya. Melalui perencanaan dari bawah ini, maka dipastikan bahwa masyarakat akan merasa ikut memiliki apa yang direncanakan, apa yang dibangun dan apa hasilnya.

Melalui program kerja sama antara LSM dalam negeri dengan NGO luar negeri, maka ada banyak hal yang dilakukan secara bersama-sama. Banyak di Indonesia bermunculan LSM yang bergerak di dalam pendampingan masyarakat dan lembaga-lembaga keagamaan. Misalnya LP3ES, P3M dan LBH serta lembaga sosial yang bergerak untuk pendampingan pembangunan, khususnya dalam memetakan kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat tersebut. Di antara kelebihan para aktivis LSM adalah kemampuannya untuk bersama masyarakat merumuskan apa yang menjadi kebutuhannya melalui kerja "need assessment" atau analisis kebutuhan. Melalui analisis kebutuhan ini, bersama masyarakat para aktivis LSM memetakan apa saja yang menjadi kebutuhan dasarnya, mulai dari yang urgent, necessary, dan important. Melalui Teknik deteksi kebutuhan yang sangat baik, maka akhirnya bisa diperoleh mana yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat lokal.

Selain itu juga kemampuan untuk mendeteksi atau menganalisis situasi sosial. Para aktivis bersama masyarakat secara Bersama-sama untuk memahami apa yang menjadi kendala dan potensi sosial untuk kesuksesan pelaksanaan program. Tentu tidak mudah untuk menyelaraskan antara kebutuhan prioritas dengan situasi sosial tersebut. Di mana-mana selalu ada tarik-menarik kepentingan, sehingga untuk mencapai derajat tinggi kebutuhan prioritas yang didukung oleh semua pihak tentu menjadi sangat penting. Jika semua sudah selaras, maka barulah dirumuskan secara bersama-sama untuk menentukan apa yang menjadi kegiatan utama dalam proses pembedayaan masyarakat. Tentu ada banyak alternatif, tetapi dengan merumuskannya secara partisipatif, maka akan diperoleh mana alternatif terbaik yang relevan dengan keinginan masyarakat.

Setelah pemerintahan Presiden Soeharto tumbang, maka perencanaan partisipatif diadaptasi oleh dunia birokrasi, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Lembaga pemerintahan ini mengadopsi sistem perencanaan yang selama ini *top down* menjadi *bottom up*. Pola perencanaan dari bawah atau *bottom up* dijadikan sebagai pilihan di dalam perencanaan pembangunan nasional. Untuk merencanakan pembangunan pada tahun yang akan datang, maka tahun ini dilakukan perencanaannya secara gradual atau bertingkat. Dimulai dengan Musyawarah Desa (Musdes) lalu Musyawarah Kecamatan (Muscam), terus musyawarah kabupaten/kota atau Muskab dan kemudian Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat provinsi dan diakhiri pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang dilakukan di tingkat pusat. Musrenbangnas selalu dihadiri oleh Presiden dan Kabinet Indonesia Kerja yang dilakukan selama sehari-hari, selama ini tiga hari

sampai empat hari. Dengan demikian perencanaan pembangunan nasional merupakan rangkuman dari seluruh perencanaan yang sudah dilakukan di tingkat provinsi. Perencanaan pembangunan berisi prioritas-prioritas pembangunan dari seluruh Indonesia, yang dihasilkan dari musyawarah secara bertahap.

Perencanaan pembangunan tentu harus mengacu pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2019-2024, yang meliputi: 1) Penghapusan Kemiskinan, 2) Penghapusan kelaparan, 3) Kesehatan dan kesejahteraan, 4) Pendidikan berkualitas, 5) kesetaraan gender, 6) Air bersih dan sanitasi, 7) Energi bersih dan terjangkau, 8) pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan layak, 9) infrastruktur tangguh, industri inklusif dan inovatif, 10) pengurangan kesenjangan, 11) Kota inklusif dan berkelanjutan, 12) Konsumsi dan produksi berkelanjutan, 13) perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, 14) pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem laut, 15) pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, 16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh, 17) kemitraan untuk semua tujuan pembangunan.

Melalui SDGs ini maka seluruh perencanaan pembangunan akan diarahkan. Dengan demikian meskipun perencanaan berasal dari bawah akan tetapi sebenarnya juga harus menggunakan rambo-rambo SDGs yang sudah disepakati untuk implementasi pembangunan di Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia, pembangunan berbasis pada perencanaan dari bawah merupakan perubahan orientasi pemerintah yang menginginkan juga terjadinya paradigma pembangunan yang benar-benar dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pemberdayaan Pesantren

Tidak ada yang tetap atau stagnan di dalam kehidupan ini. Semuanya mengalami perubahan baik perubahan yang cepat atau perubahan yang lambat. Perubahan yang revolusioner atau yang evolusioner. Perubahan di dalam kehidupan di dunia adalah sesuatu yang abadi. Hanya saja perubahan yang diinginkan oleh siapa saja adalah perubahan yang menuju kepada kebaikan. Saya kira tidak ada manusia di dunia ini yang sesungguhnya menginginkan perubahan yang justru akan mendegradasi kemanusiaan, tetapi sebaliknya justru ingin terjadinya gradasi perubahan menuju ke arah kebaikan dan kemaslahatan. Perubahan yang diinginkan menuju kepada kebaikan tersebut adalah pembangunan. Dengan demikian, pembangunan merupakan usaha yang dilakukan secara prosedural berdasar atas prinsip-prinsip perubahan kepada kebaikan untuk peningkatan kesejahteraan

dan kebahagiaan masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah pembangunan pendidikan pesantren.

Dunia pesantren di masa lalu sering dilabel sebagai lembaga pendidikan tradisional. Artinya lembaga pendidikan yang tidak mengalami perubahan yang signifikan. Lembaga yang hanya mengusung nilai-nilai masa lalu tanpa mau bersentuhan dengan dunia modern yang terus berubah. Ada banyak ahli-ahli keindonesiaan yang melabel pesantren dengan sebutan peyoratif atau mengolok-olok kepada pesantren. Misalnya Deliar Noor. Dalam pandangannya bahwa pesantren merupakan lembaga yang melestarikan paham dan pengamalan beragama yang jumud dan hanya berorientasi pada masa lalu dan kuburan. Tetapi pandangan seperti ini kemudian dikoreksi oleh para ahli lain, misalnya Zamakhsyari Dhofier dan Karl Steenbrink. Dalam pandangan Zamakhsyari, bahwa pesantren telah mengalami perubahan yang signifikan dalam menghadapi perubahan sosial. Jika di masa lalu sistem pesantren itu hanya pada sistem pembelajaran tradisional, maka ternyata sudah berubah dengan mengadaptasi sistem pendidikan madrasah dengan perubahan metode pembelajaran dan kurikulumnya, dan bahkan yang terakhir juga mengadopsi sistem klasikal sebagai sistem pembelajaran modern. Kemudian Karl Steenbrink juga menyatakan bahwa sudah ada perubahan signifikan dalam melihat perkembangan pesantren. Jika di masa lalu hanya mengandalkan ekosistem pesantren tradisional, maka sudah berubah menjadi pendidikan bersistem madrasah dan yang terakhir sudah mengadaptasi sistem pendidikan umum, dari pesantren ke madrasah ke sekolah.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan rakyat. Maksudnya bahwa pesantren merupakan lembaga yang kebanyakan siswa atau santrinya adalah masyarakat kelas menengah ke bawah. Mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah yang selama ini memilih pesantren. Hanya perkembangan terakhir ini yang mengindikasikan bahwa ada banyak orang kelas menengah ke atas yang memondokkan anaknya. Hal ini seiring dengan munculnya pesantren dengan label modern. Misalnya Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo. Tetapi juga tidak selalu seperti ini. Pesantren Nurul Iman di Parung yang melabel dirinya dengan pesantren al 'ashriyah atau pesantren modern bahkan banyak diminati oleh kalangan menengah ke bawah, bahkan pesantren ini menggratiskan makan dan pemonudukan bagi seluruh santrinya.

Ihwal pesantren bersentuhan dengan dunia pemberdayaan masyarakat adalah di kala Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) melakukan pendampingan terhadap pesantren-pesantren di Indonesia untuk melakukan perubahan orientasi pesantren

yang berfokus pada pembelajaran keagamaan atau umum menjadi pesantren dengan pengembangan sosial dan ekonomi. Melalui dukungan dari LSM, maka banyak pesantren yang kemudian terlibat di dalam pengembangan masyarakat. Pesantren tidak hanya mendidik santrinya untuk berpengetahuan agama, akan tetapi juga mengajak masyarakat di sekitarnya untuk berkembang sesuai dengan potensinya.

Di antara yang menonjol adalah yang dilakukan oleh Pesantren Guluk-Guluk Sumenep. Pesantren An Nuqayah ini terlibat di dalam pemberdayaan masyarakat petani lahan kering di sekitar pesantren. Melalui program pemberdayaan yang dilakukan maka lahan kering yang selama itu tidak produktif menjadi produktif. Dalam program pemberdayaan yang melibatkan masyarakat, maka tokoh pesantren menggunakan bahasa-bahasa lokal, misalnya bek-rembek. Melalui bek-rembek atau musyawarah, maka masyarakat diajak untuk memahami apa problem pertanian lahan kering, lalu bagaimana cara mengatasinya. Ternyata di dalam kajian Bisri Effendi, melalui program pemberdayaan masyarakat tersebut ternyata bisa meningkatkan penghasilan masyarakat.

Yang juga menarik adalah yang dilakukan oleh Pesantren Maslakul Huda dan Pesantren Langitan. Kedua pesantren ini mengembangkan budidaya ternak ayam broiler, yang juga mengajak masyarakat untuk melakukan perubahan. Jika selama ini mereka memelihara ayam hanya secara apa adanya, maka dengan dukungan pesantren, maka masyarakat juga membudidayakan peternakan ayam dan hasilnya memadai untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dewasa ini, banyak pesantren yang sudah berkembang lebih jauh, misalnya pesantren Sidogiri, yang diasuh oleh Kyai Nawawi, yang memiliki koperasi dengan aset sudah triliunan rupiah dan kemudian juga mengembangkan ritel modern. Ritel Basmalah ini telah berkembang dengan cepat di wilayah Pasuruan dan sekitarnya dan menjadi salah satu ritel yang sudah menerapkan prinsip-prinsip modern. Kopontren Sidogiri merupakan koperasi yang bisa menjadi contoh bahwa pesantren ternyata bisa mengelola lembaga keuangan yang baik dan bermanfaat.

Pesantren Nurul Iman yang diasuh oleh Bu Nyai Umi Waheeda juga sudah berkembang dengan memiliki sejumlah usaha. Mulai dari percetakan, foto copy, air mineral, usaha-usaha Syariah dan bahkan lembaga keuangan. Semuanya dirancang dengan support dari pihak eksternal, seperti Bank Indonesia. Pesantren-pesantren Darul Qur'an juga sudah berkembang sangat luar biasa. Pesantren Darul Qur'an yang diinisiasi Ustadz Yusuf Mansur ini bahkan sudah memasuki dunia usaha

yang sangat luar biasa, misalnya lembaga keuangan, Paytren dan usaha-usaha Syariah lainnya.

Pesantren yang dahulu dilabel dengan sebutan tradisional, sekarang sudah berubah menjadi pesantren modern dengan manajemen modern. Semua ini tentu tidak lepas dari upaya-upaya pihak internal dan eksternal dalam kerangka untuk mendorong pesantren agar bergerak tidak hanya di dalam pembelajaran agama saja tetapi juga harus merambah aspek ekonomi. Dan rupanya dunia pesantren berhasil.

Dalil pesantren yang hebat adalah: “al Muhafadhatu ‘ala al qadimish shalih wa al akhdzu bi al jaded al ashlah”. Yang artinya kurang lebih “memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik”. Pesantren tetap mengembangkan pendidikan keislaman sebagai *core* bisnisnya, tetapi juga mengambil program pembelajaran baru yang lebih baik dan bahkan mengembangkan dunia usaha yang menguntungkan untuk pengembangan kelembagaan pesantren.

Kesimpulan

Perubahan sosial yang cepat tentu disikapi dengan melakukan perubahan yang relevan dengan tuntutan perubahan yang bercorak positif. Pesantren sebagai lembaga Pendidikan Islam yang pada kurun masa lalu disebut sebagai institusi Pendidikan tradisional, ternyata juga sudah berubah sangat jauh, yaitu dengan melakukan perubahan dalam sistem pembelajaran, konten pembelajaran dan jenjang serta jalur pendidikan yang variatif. Semua ini dilakukan dalam kerangka untuk menyongsong era ke depan yang tentu tantangannya lebih complicated.

Pesantren memang telah berubah, akan tetapi pesantren tetap menjadi lembaga pendidikan yang berfokus pada pendidikan keislaman sebagai *core* bisnisnya sambil terus berubah untuk menjadi lebih baik. Pesantren tidak tabu untuk mengembangkan usaha-usaha Syariah, keuangan Syariah dan industri kecil berbasis Syariah. Semua ini dilakukan tidak hanya untuk kepentingan ekonomi subsistensi tetapi juga untuk membekali para siswanya agar tidak gagap untuk menjemput masa depan.

Kali ini kita disuguhi buku karya Bambang Budiwinarno yang berjudul “Pengembangan Masyarakat di Pesantren, Antara Dominasi Elit dan Budaya Lokal”. Buku yang membahas secara mendalam tentang bagaimana pesantren bergulat dengan perubahan sosial yang mendasar. Perubahan sosial tersebut tentu selalu mengandung dua aspek atau lebih yang terkait dengan bagaimana perubahan tersebut

dilakukan. Di dalam buku ini dijelaskan mengenai pertarungan antara elit pesantren dengan budaya lokal. Elit pesantren yang sudah memperoleh berbagai pemahaman tentang agama dan perubahan sosial, termasuk pemberdayaan masyarakat tentu juga harus berhadapan dengan budaya lokal yang di kalangan masyarakat tetap dijadikan sebagai *pattern for behaviour*, sehingga juga tidak gampang yang dibayangkan. Buku ini menjelaskan tentang bagaimana kiat dan strategi para kiai dalam mengelola perubahan sosial melalui program pemberdayaan masyarakat. Saya berkeyakinan bahwa buku ini dapat menjadi bacaan yang baik bagi aktivis pengembangan masyarakat, mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) dan juga mahasiswa yang memiliki *concern* dalam upaya perubahan sosial dalam berbagai levelnya. Selain itu juga berguna bagi masyarakat yang secara opsional melakukan pengembangan diri, komunitas dan masyarakat. Selamat membaca.

Wallahu a'lam bi al shawab.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Sambutan dari Prof. Dr. Nur Syam, MSI	iv
Daftar Isi	xiii
BAB I Pendahuluan	
A. Latar belakang	1
B. Pendekatan Partisipasi dalam Pembangunan	4
C. Sistematika	17
BAB II Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan	
A. Karakteristik Pesantren	18
B. Reformasi Pesantren	25
C. Pesantren, Kyai, dan Masyarakat Desa	33
D. Kesimpulan	39
BAB III Akar Historis dan Paradigma Pengembangan Masyarakat di Pesantren	
A. Modernisasi Orde Baru	42
B. LP3ES, P3M dan Introduksi Partisipasi di Pesantren	47
C. Paradigma Partisipasi Pengembangan Masyarakat di Pesantren	51
D. Pelatihan Fasilitator Pengembangan Masyarakat di Pesantren	58
E. Kesimpulan	64
BAB IV Partisipasi dalam Pengembangan Masyarakat di Pesantren Annuqayah	
A. Pesantren Annuqayah dan Masyarakat Guluk-Guluk	68
B. Pengembangan Masyarakat Sebagai Dakwah Bi al-Hal	72
C. Pengajian dan Otoritas Kyai dalam Pengembangan Masyarakat	75
D. Implementasi Aktivitas Pengembangan Masyarakat	82
E. Implikasi Pengembangan Masyarakat terhadap Pesantren Annuqayah	89
F. Kesimpulan	91

BAB V Partisipasi dalam Pengembangan Masyarakat di Pesantren Maslakul Huda

A. Pesantren Maslakul Huda dan Kajen	94
B. Pengembangan Masyarakat Sebagai Ibadah Sosial	98
C. Rukun Tetangga dan Riset Aksi Partecipatoris	101
D. KSM dan Implementasi Aktifitas Pengembangan Masyarakat	107
E. Implikasi Pengembangan Masyarakat terhadap Pesantren Maslakul Huda	112
F. Kesimpulan	114

BAB VI Penutup

A. Kesimpulan	117
B. Budaya Lokal dalam Pengembangan Masyarakat	120
C. Kontinuitas Dominasi Sosial Pesantren atas Masyarakat	128
D. Pengembangan Masarakat dan Transformasi Sosial Politik Makro	136

Appendix 1: Nilai Tukar Rupiah (Rp) Terhadap US\$ 1

Daftar Pustaka